



KEMENTERIAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Kebijakan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
(Era Baru Kebangkitan Produk Hasil Hutan Indonesia)



<http://silk.dephut.go.id>

Oleh:

Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Surabaya, 7 November 2013
(Workshop Legalitas Ekspor Kayu Indonesia)

NEGOSIASI FLEGT - VPA INDONESIA - EU

Signing FLEGT-VPA RI –EU

Brussels, 30 September 2013

- Pengakuan EU terhadap SVLK secara resmi.
- Bukti nyata Indonesia memerangi *illegal logging* dan *illegal trading*.
- Merupakan puncak negosiasi yang intensif selama 6 tahun.
- Keberhasilan diplomasi Indonesia.
- Mencakup sistem lisensi atas produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke 28 negara anggota EU.
- SVLK merupakan sistem penjaminan legalitas kayu pertama di dunia yang sejalan dengan asas FLEGT.
- Importir di UE tidak perlu melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) atas produk kayu berlisensi FLEGT (Dok V-Legal).
- SVLK menjadi benchmark standar legalitas bagi negara lain yang akan melakukan negosiasi VPA dengan EU.
- EU dan RI segera memproses ratifikasi.

Penandatanganan VPA

Brussel, 30 September 2013









Speech by Presidency (Mr. Janez Potocnik)

- *“Perjanjian tersebut memperkuat hubungan antara Indonesia - Uni Eropa .
Negosiasi telah dilakukan dengan sangat baik, kooperatif dan semangat konstruktif
yang mendefinisikan hubungan tersebut.”*
- *Perjanjian ini merupakan hasil positif yang kita miliki saat ini di atas meja dan
menandai sebuah tonggak baru dan penting*
- *langkah berikutnya adalah kelancaran dan kesuksesan implementasi dari
perjanjian*

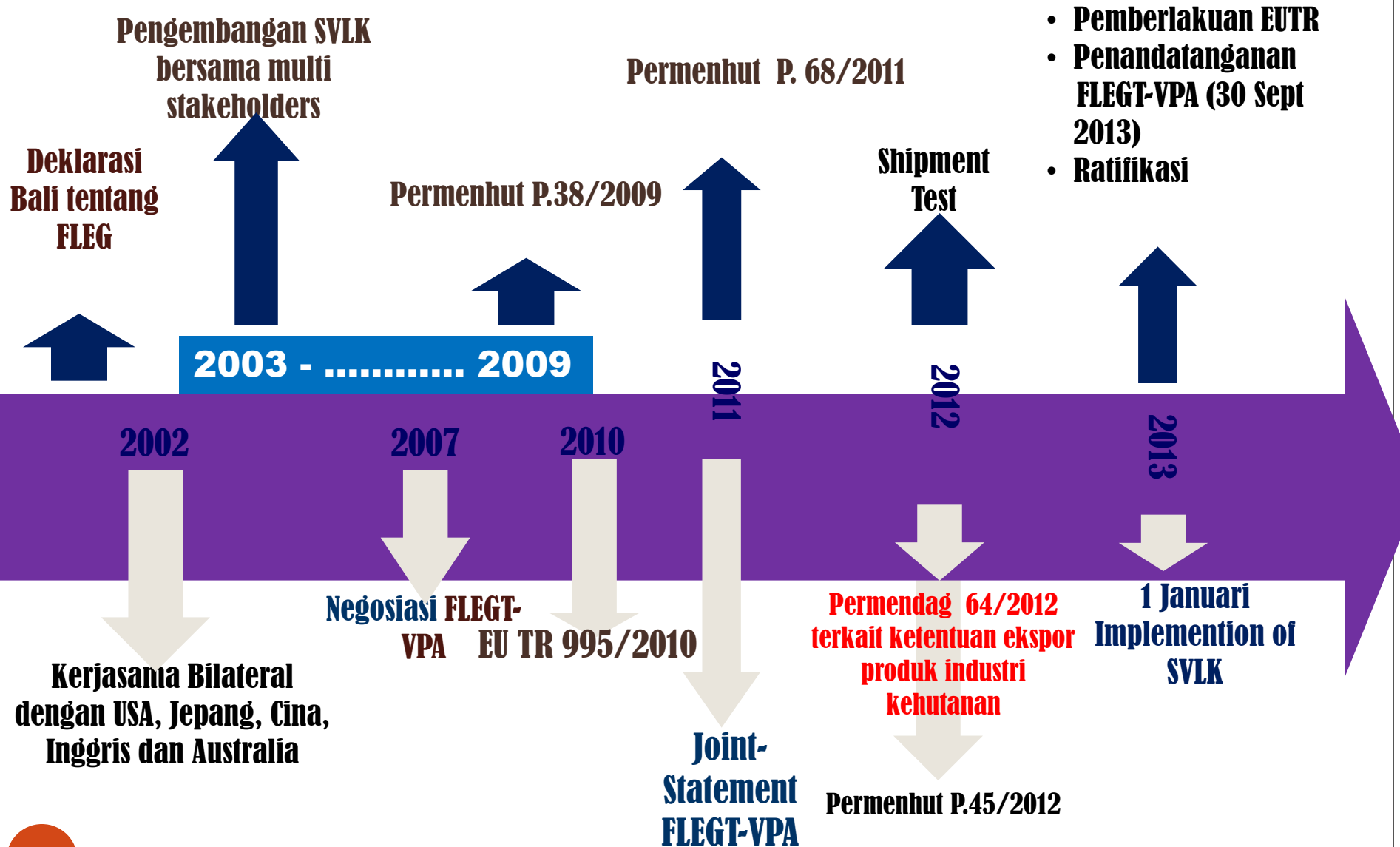
Speech by Commission (Mr. Valentinas Mazuronis)

- *“Di sisi Uni Eropa pengakuan eksplisit dari lisensi kayu FLEGT dalam peraturan kayu Uni Eropa merupakan langkah penting untuk mengakui upaya mitra FLEGT VPA kami.”*
- *“Perjanjian ini berfungsi sebagai contoh kepada dunia bagaimana perdagangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dibuat kompatibel dan saling memperkuat . “*
- *“Saya juga ingin berterima kasih kehadiran Menteri Kehutanan di Honduras dan saat ini sebagai Ketua International Tropical Timber Council, saya bertemu dengannya tahun lalu untuk peluncuran FLEGT VPA dengan Honduras. Saya berharap menyaksikan upacara penanda tanganan ini telah memberikan inspirasi bagi Anda.”*

Menteri Kehutanan RI (Bapak Zulkifli Hasan)

- *“Merupakan perjanjian pertama di Asia, antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam isu masalah lingkungan hidup”.*
- *“FLEGT VPA telah mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, terutama wilayah yang mencakup rentan terhadap pembalakan liar”.*
- *“Pelaksanaan FLEG VPA ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan kayu legal dengan tetap menjaga kualitas lingkungan”.*
- *“Saat ini lebih dari 20 Juta Ha hutan produksi dan 700 Industri kayu telah diberikan sertifikat legalitas kayu, dan hal ini akan terus berlanjut karena masih ada banyak hutan dan industri kayu yang belum bersertifikat”.*
- *“Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Indonesia National Single Window (INSW) telah memiliki infrastruktur untuk menjalankan sistem dalam hal kaitannya dalam keterlacakan di dokumen V-Legal”.*
- *“Dengan siapnya produk kayu Indonesia yang legal ini, diharapkan dalam waktu dekat, perdagangan domestik di Indonesia juga akan bersertifikat Legal”.*

Pengembangan dan pelaksanaan SVLK

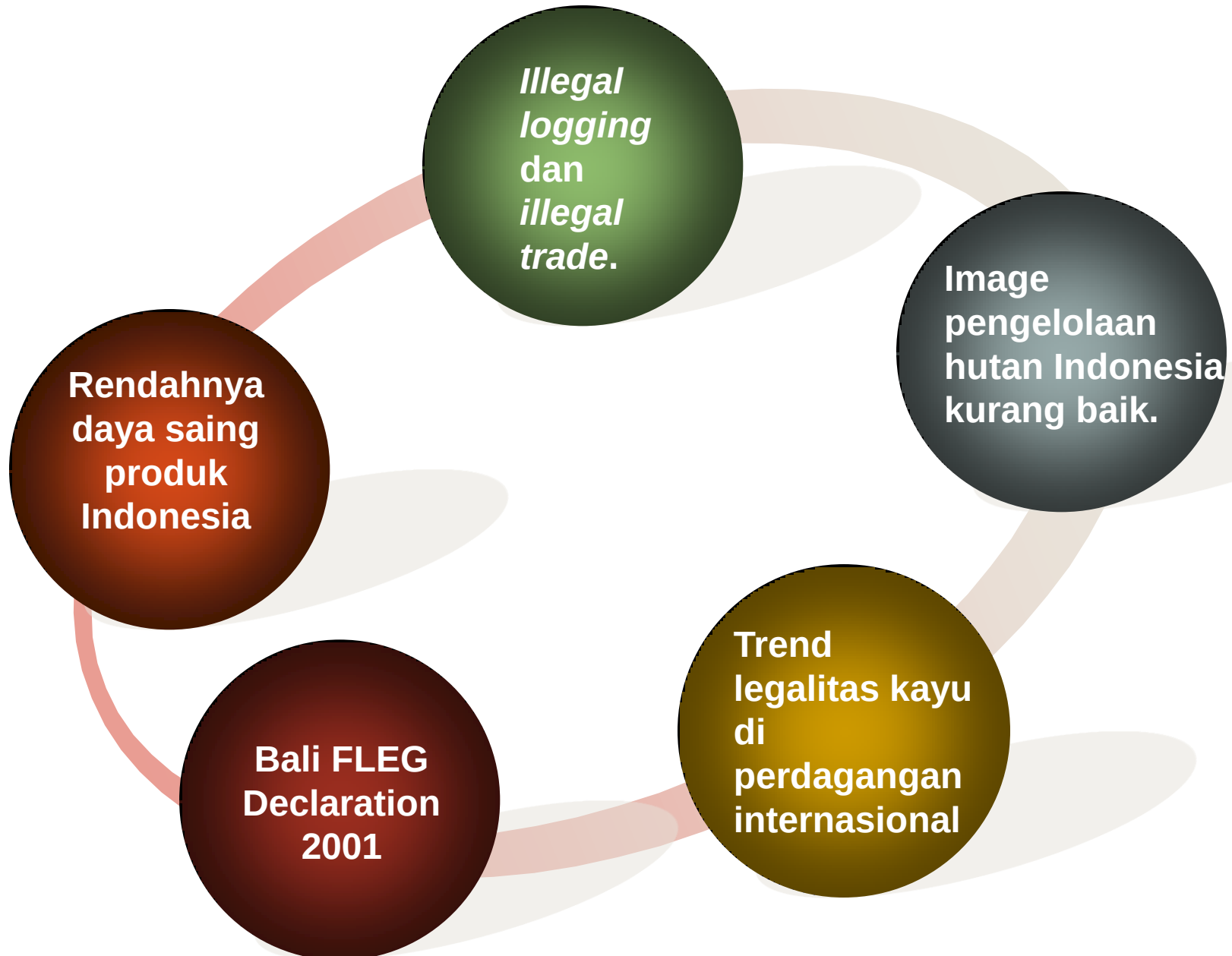


SVLK

Landasan Hukum

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.
- Permenhut P.38/Menhut-II/2009 terakhir dirubah dengan P.42/Menhut-II/2013 tentang *Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak*.
- Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.

Latar Belakang SVLK



Kronologi Perkembangan SVLK



*Illegal logging dan
illegal trading*



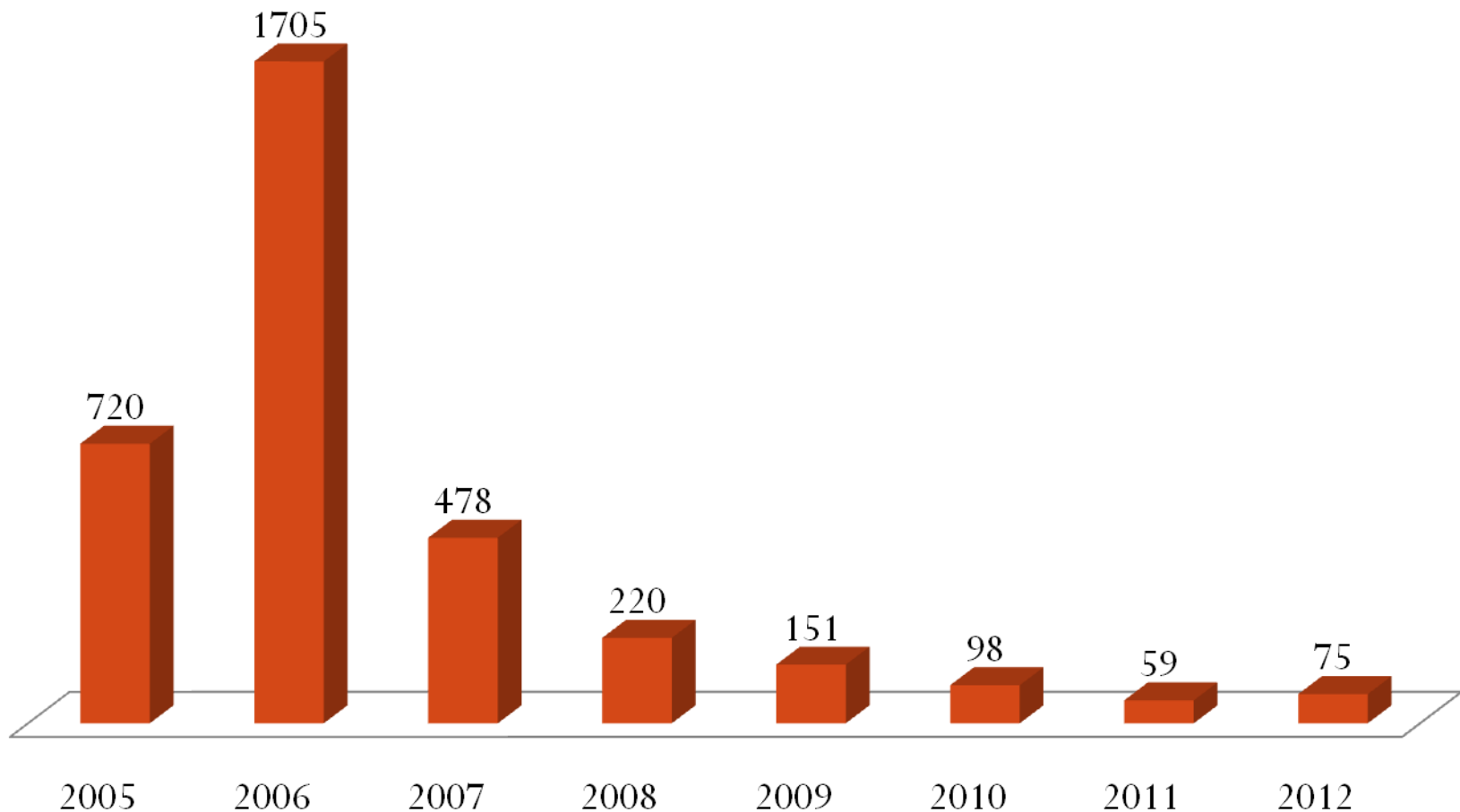
Penindakan Hukum



Tata Kelola Kehutanan

Tren Kasus *Illegal Logging* Tahun 2005 - 2012

HARD
APPROACH



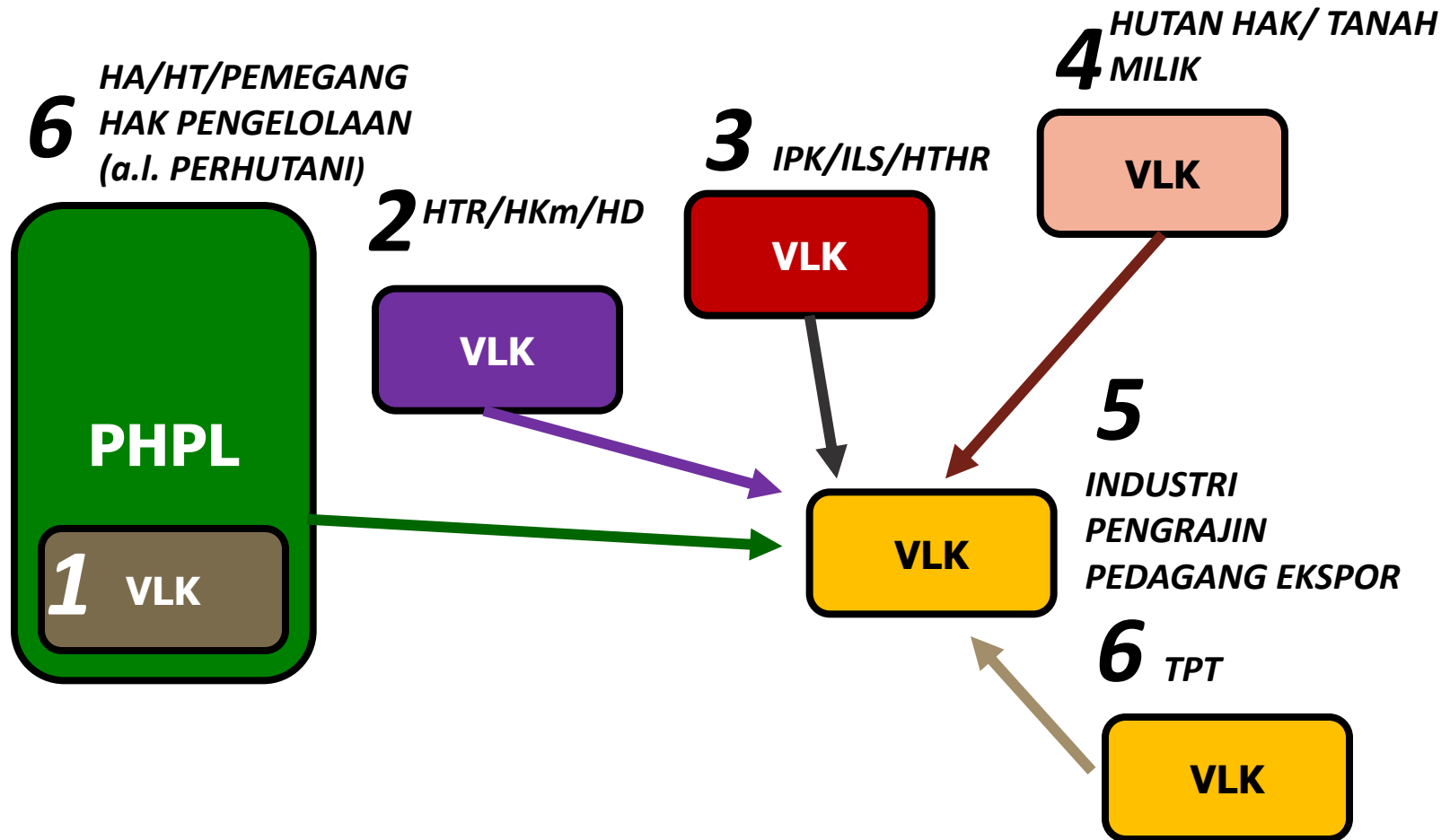
Sumber: Dit. PHH (2013)

Prinsip SVLK

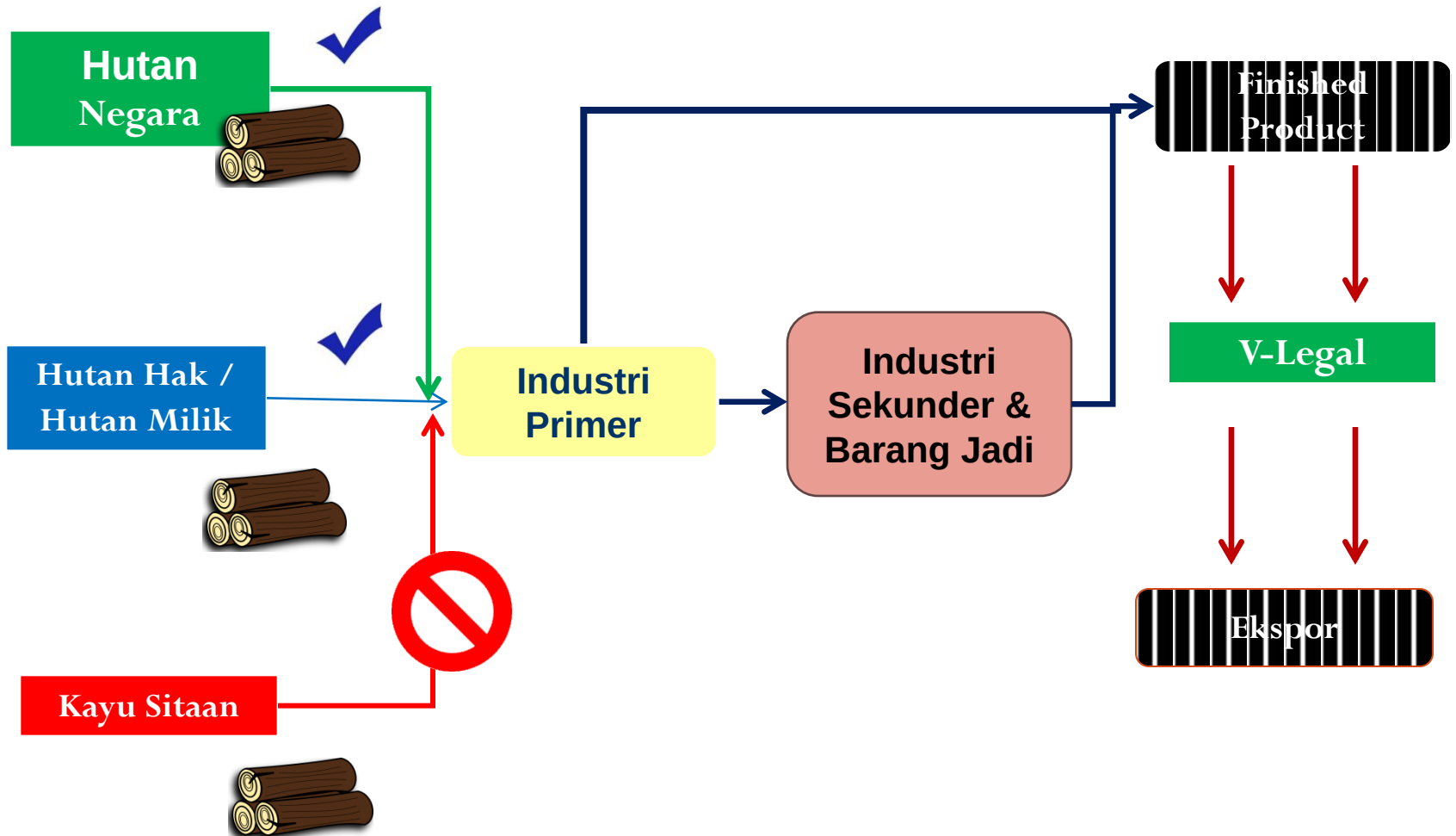
1. Tata Kelola yang lebih baik
(*Governance*)
2. Keterwakilan
(*Representativeness*)
3. Transparansi/keterbukaan
(*Credibility*)

Obyek SVLK

(P.38/Menhut-II/2009 jjs P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012
dan P.42/Menhut-II/2013)

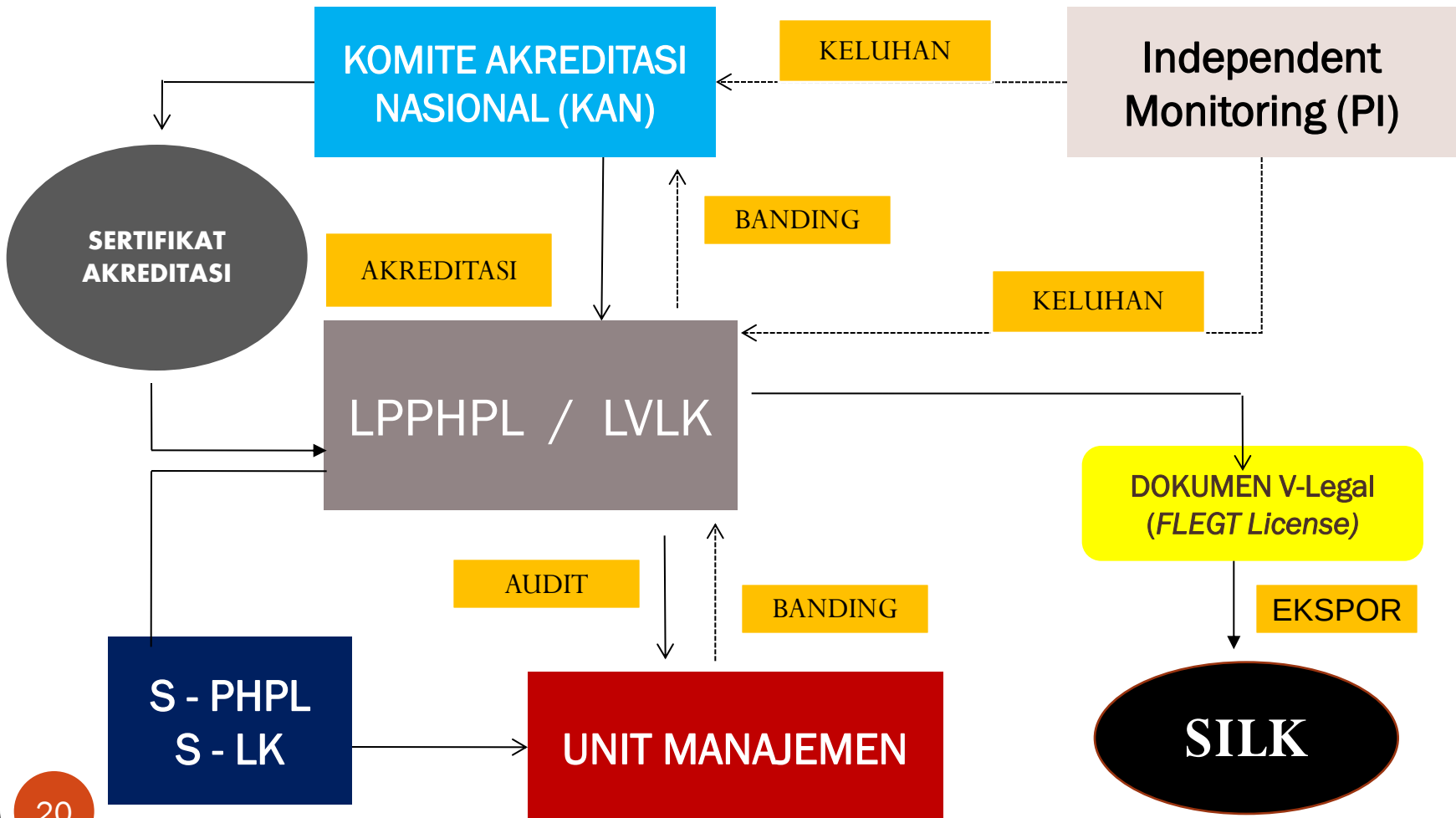


Lingkup SVLK



Skema SVLK

KEMENTERIAN (Regulator)



JANGKA WAKTU SERTIFIKASI DAN PENILIKAN SVLK

No	Jenis Izin / U.M / Auditi	Sertifikat	Jangka Serifikasi (th)	Penilikan (th/sekali)	Batas waktu sertifikasi
1.	IUPHHK-HA/HT/RE dan Pengelolaan	PHPL	5	1	31-12- 2013
		LK	3	1	31-12-2013
2.	IUPHHK-HTR/HKm/HD	LK	3	1	31-12-2013
4	IUIPHHK	LK	3	1	31-12-2012
3.	Hutan Hak	LK	10	2	31-12-2013
4.	IUI >500 jt	LK	3	1	
5.	IUI <500 jt	LK	6	2	
6.	TDI	LK	6	2	
7.	Industri RT/Pengrajin	LK	6	2	
8.	TPT	LK	3	1	

Daftar LP-PHPL

No.	Nama	No. Akreditasi
1.	PT. Ayamaru Certification	LPPHPL-001-IDN
2.	PT. Sarbi International Certification	LPPHPL-004-IDN
3.	PT. SUCOFINDO SBU (SICS)	LPPHPL-005-IDN
4.	PT. Almasentra Certification	LPPHPL-006-IDN
5.	PT. Rensa Global Trust	LPPHPL-007-IDN
6.	PT. Forescitra Sejahtera	LPPHPL-009-IDN
7.	PT. Mutuagung Lestari	LPPHPL-008-IDN
8.	PT. Nusa Bakti Mandiri	LPPHPL-010-IDN
9.	PT. Equality Indonesia	LPPHPL-013-IDN
10.	PT. Multima Krida Cipta	LPPHPL-015-IDN
11.	PT. TUV International Indonesia	LPPHPL-016-IDN
12.	PT. Global Resource Sertifikasi	LPPHPL-017-IDN
13.	PT. Transtra Permada	LPPHPL-018-IDN
14.	PT. Trustindo Primakarya	LPPHPL-019-IDN

LVLK (Diakreditasi berdasar ISO/IEC Guide 65)

No.	N a m a	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	LVLK-010-IDN
11.	PT. Ayamaru	LVLK-011-IDN
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN

Progress SVLK

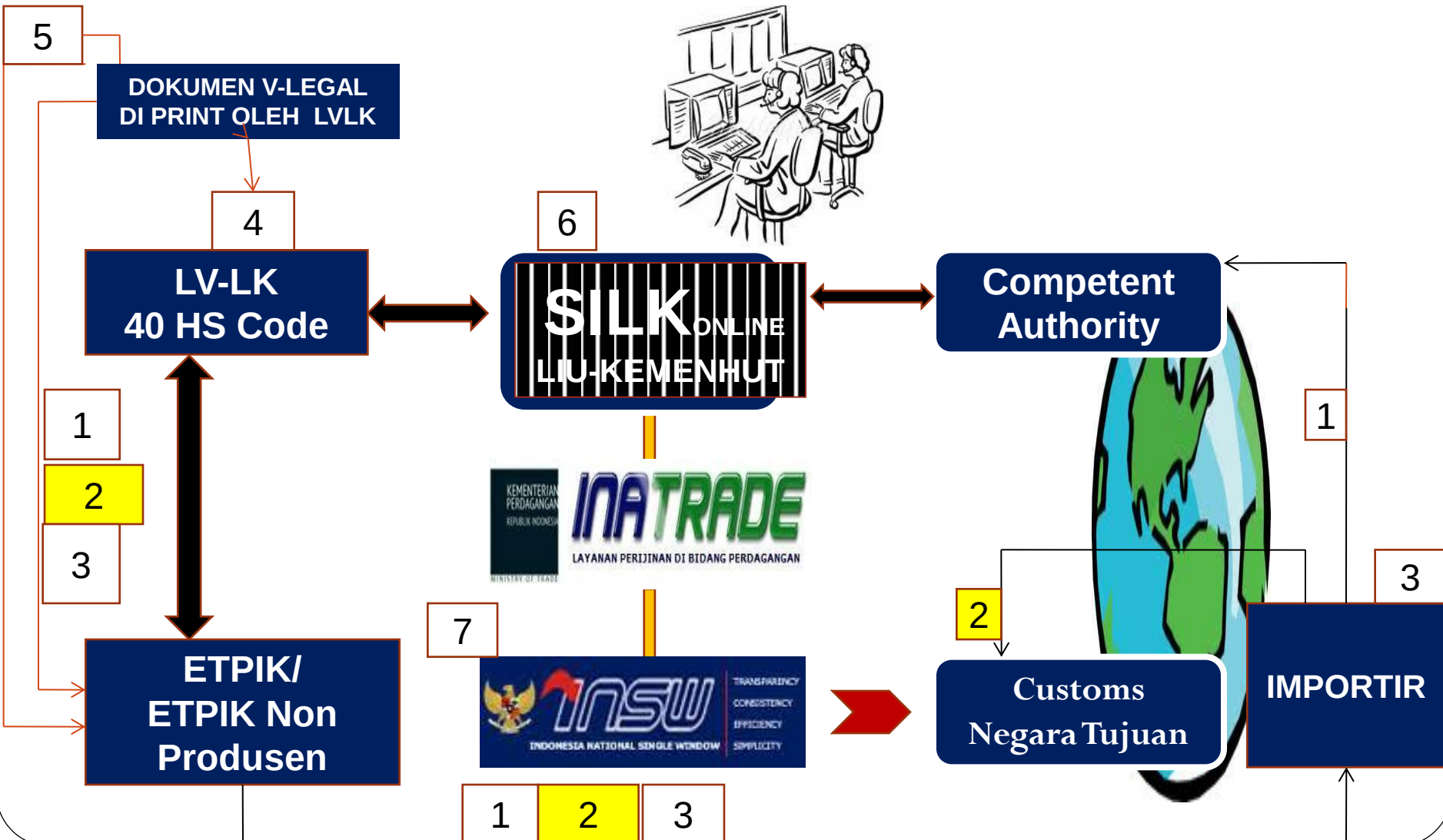
(29 Oktober 2013)

Sertifikasi	Lulus (unit/luas)	Tidak lulus (unit/luas)	Proses (unit/luas)	Jumlah (unit/luas)
PHPL (HT)	32 (3.745.939)	21 (755.183)	-	53 (4.501.122)
PHPL (HA)	92 (10.475.872)	20 (910.763)	15 (1.147.370)	127 (12.534.005)
PHPL (KPH)	6 (157.890)	-	-	6 (157.890)
VLK (HT)	42 (1.460.675)	-	-	42 (1.460.675)
VLK (HA)	23 (1.658.060)	-	-	23 (1.658.060)
VLK Hutan hak	19 (9.729)	- -	- -	19 (9.729)
VLK Industri	608	29	95	732

EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

MEKANISME EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DENGAN SVLK

PROSES PENERBITAN Dokumen V-Legal



DOKUMEN V - Legal



ORIGINAL	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-LegalFLEGT licence number		4 Date of Expiry [][]/[][]/[][]	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
1	8 License Name Address ETPK Number Tax Payer Number			
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Binding	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m ³)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
17 Distinguishing marks				
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date				

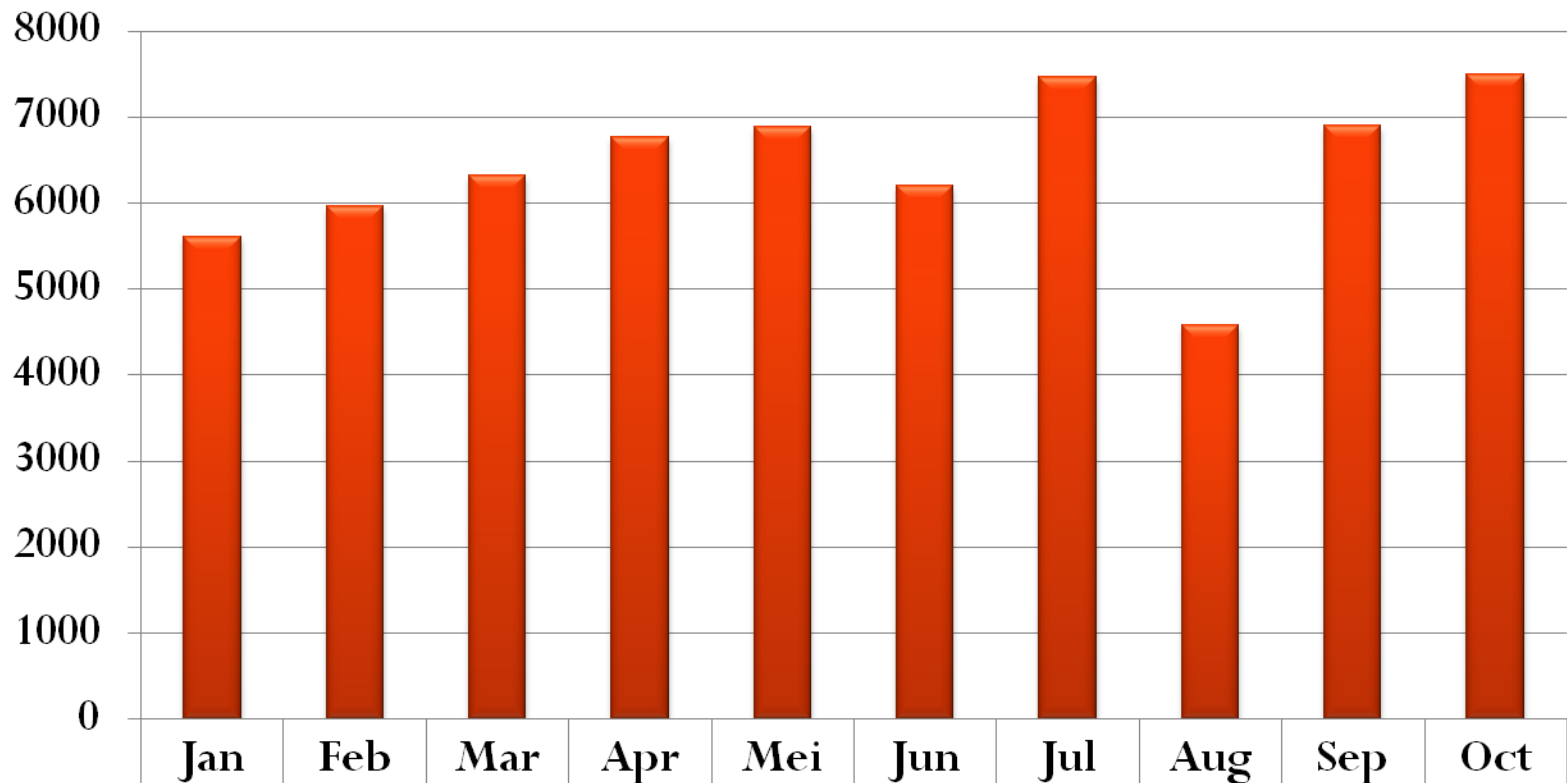
- Merupakan dokumen lisensi ekspor produk kayu
- Berlaku untuk 26 HS-Code pada tanggal 1 Januari 2013, dan total 40 HS-Code pada 1 Januari 2014 (Permendag No. 64/2012)
- Diterbitkan oleh LVLK
- Diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melalui inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK.

PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

s.d tanggal 7 November 2013; Pukul 08.00 WIB

TOTAL DITERBITKAN	65.061
NEGARA TUJUAN	153
NEGARA ANGGOTA UE	27
HS CODE	40
PELABUHAN MUAT	69
PELABUHAN BONGKAR	1.028
BERAT (KG)	6.611.927.693
NILAI (USD)	5.019.926.454

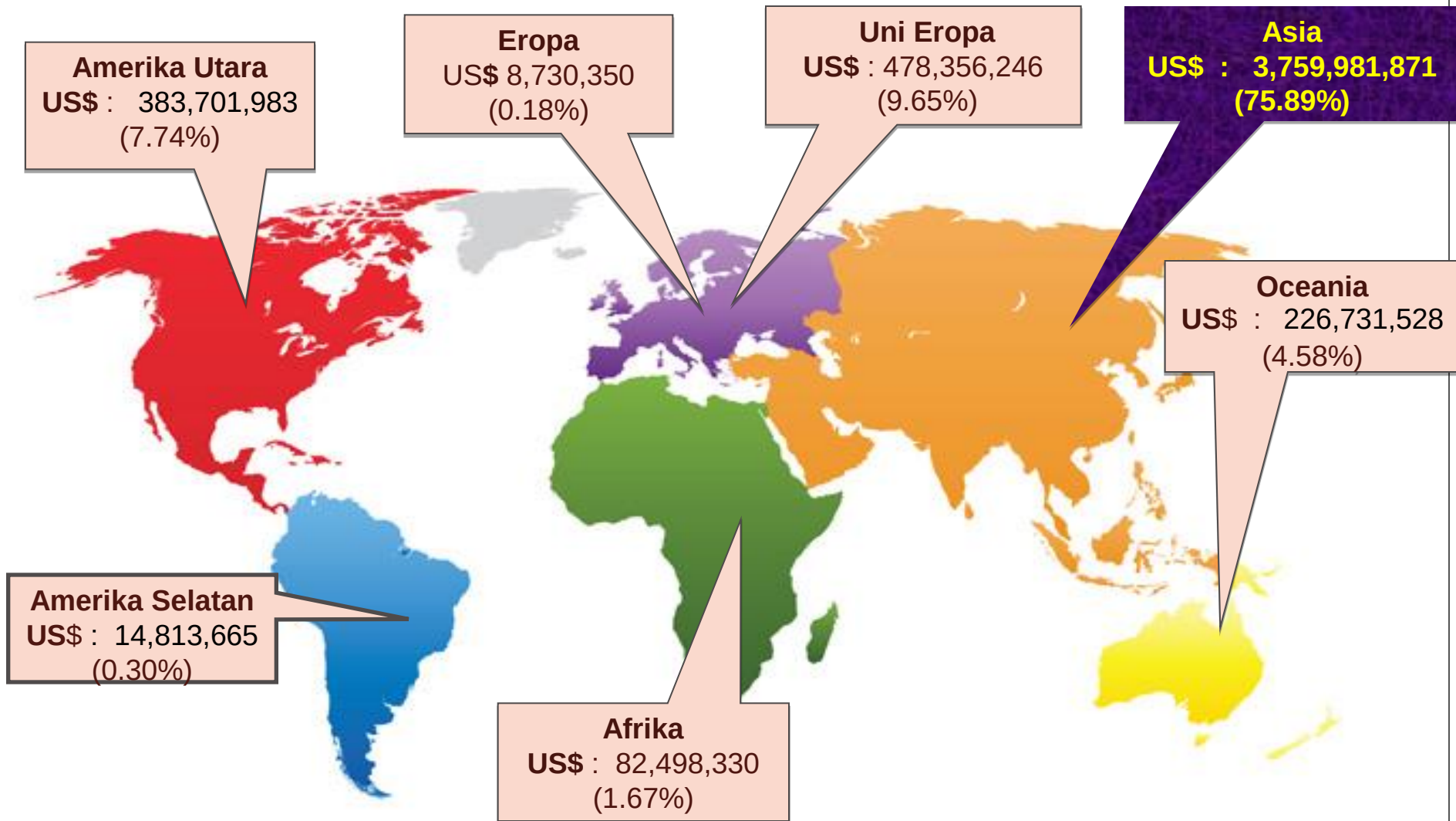
Perkembangan Penerbitan Dokumen V – Legal (Januari – Oktober 2013)



Dok V-Legal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
	5609	5959	6321	6761	6882	6194	7464	4580	6894	7494

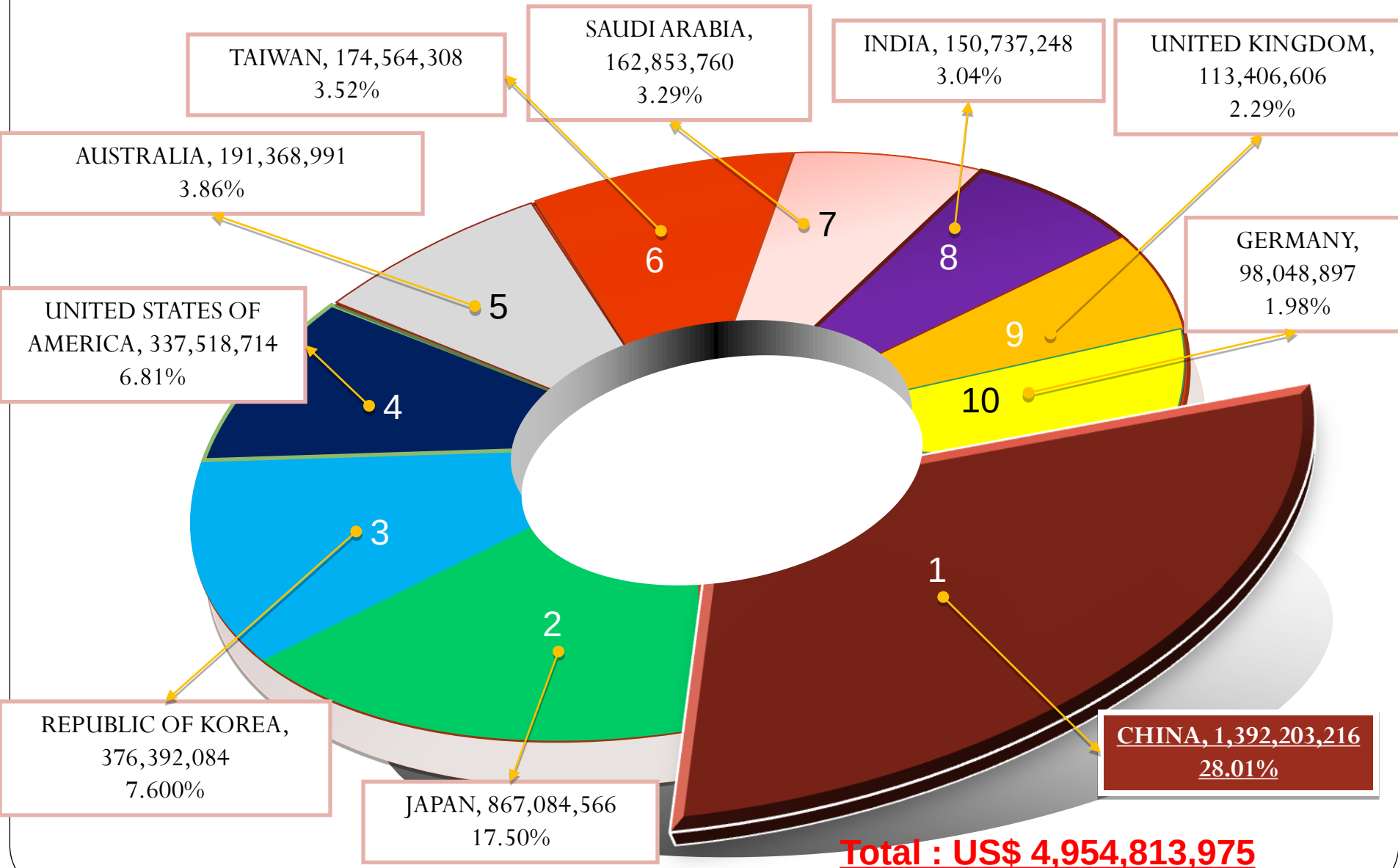
Total : 64.158 Dokumen

Nilai Ekspor per Region (Januari – Oktober 2013)

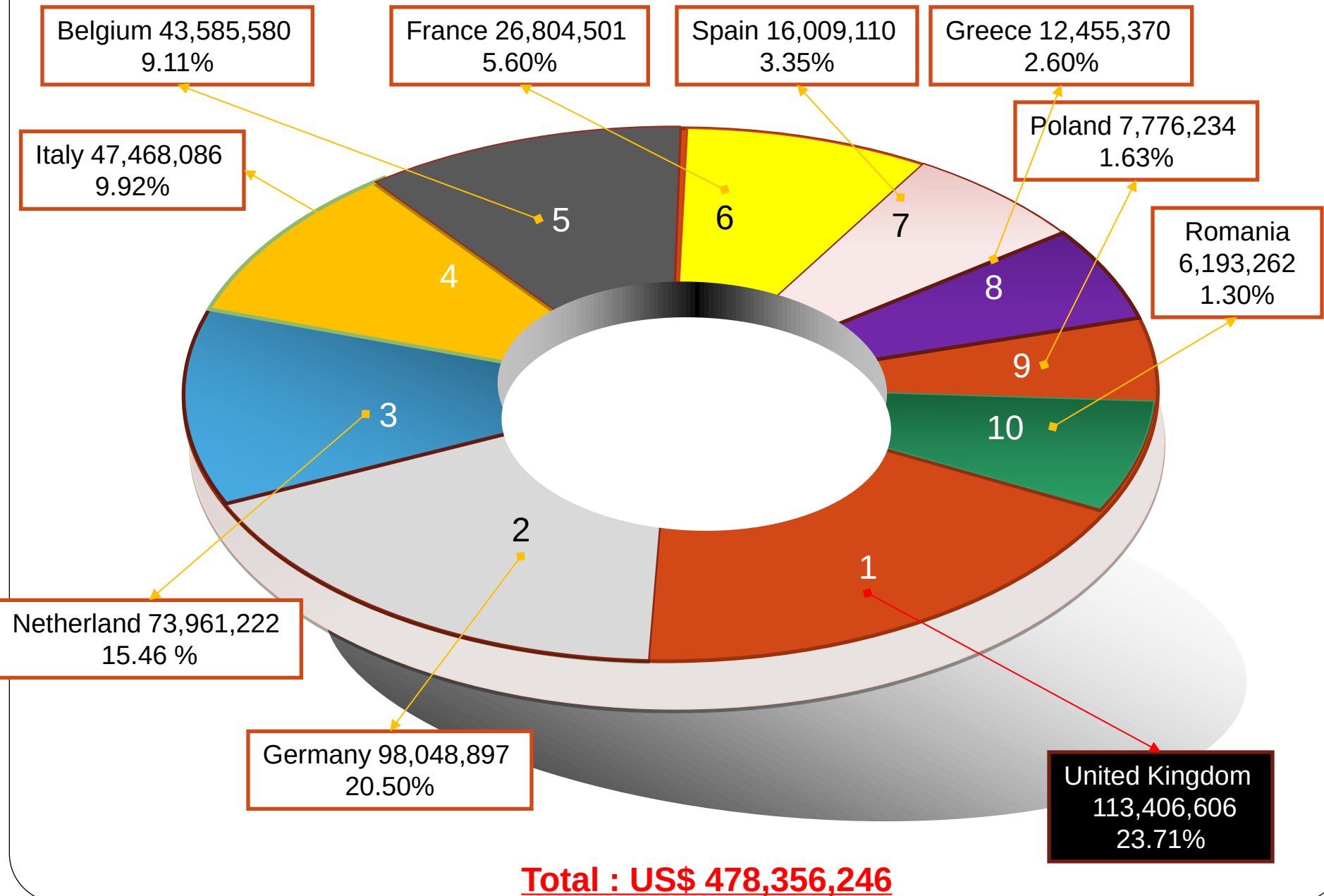


Total : US\$ 4,954,813,975

Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Ke 10 Negara Tujuan Seluruh Dunia Periode Januari – Oktober 2013 (US\$)



Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Ke 10 Negara di Uni Eropa Periode Januari – Oktober 2013 (US\$)



Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan ke “Top 10” Pelabuhan Bongkar Seluruh Dunia Periode Januari-Oktober 2013



Σ US\$ 4,954,813,975
(1,021 pelabuhan)

4 pelabuhan :
Nagoya³⁾, Tokyo ⁶⁾ ,
Osaka ⁷⁾ , Sakaisennboku
⁸⁾ = US\$ 469,592,090
= 9.48%

4 pelabuhan :
Shanghai ¹⁾, Qingdao ²⁾, Lian-
yungang ⁴⁾ & Dagang ⁹⁾
= US\$ 836,996,031
= 16.89%

1 pelabuhan :
Kaohsiung ⁵⁾
= US 114,792,299
= 2.32%

1 pelabuhan :
Gunsan ¹⁰⁾
= US\$ 88,711,934
= 1.79%

Ket : *) = peringkat

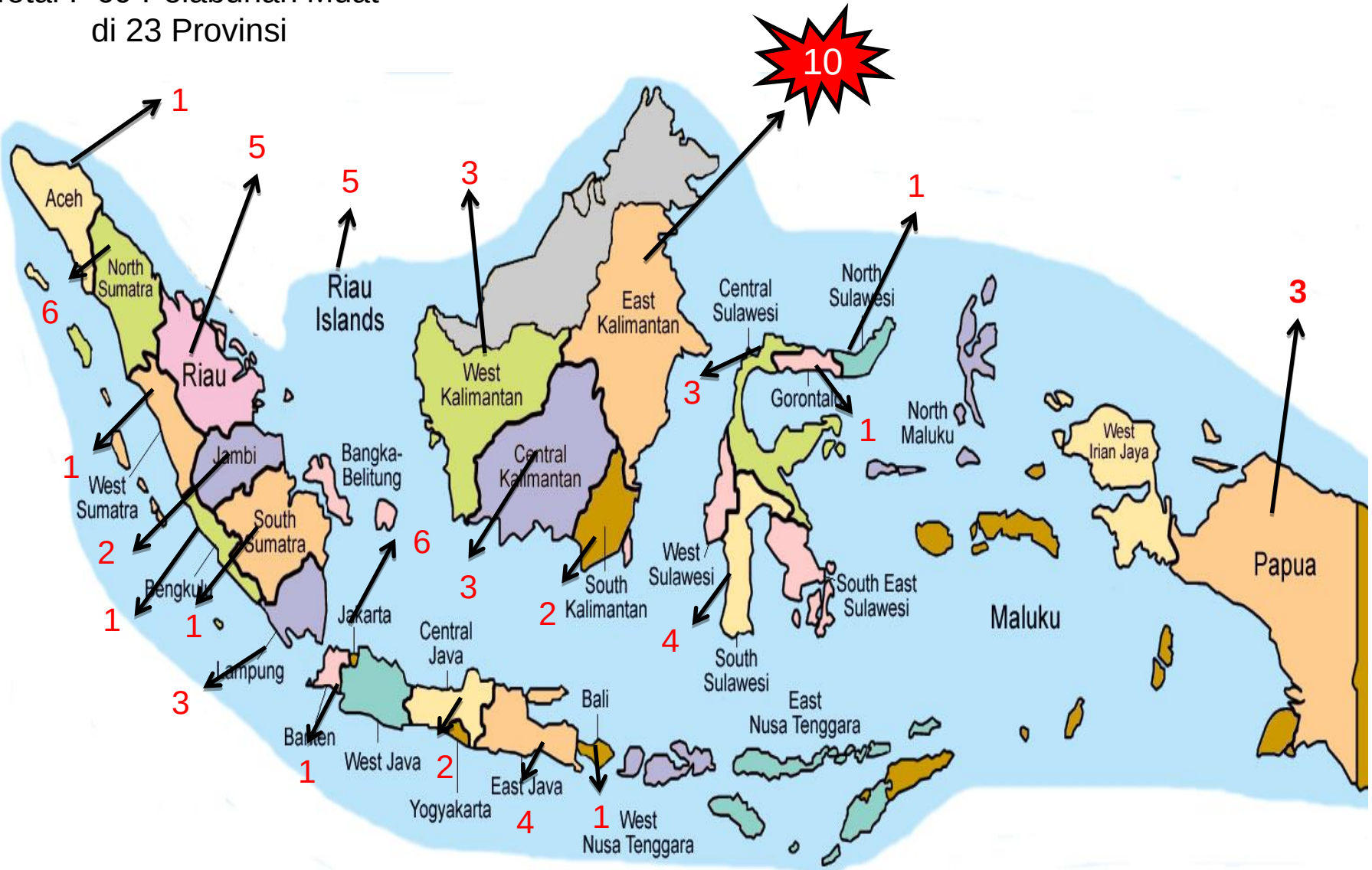
Jumlah Eksportir Januari s.d Oktober 2013 Per Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Jawa Tengah	194	Kalimantan Selatan	11
Jawa Timur	162	Sumatera Selatan	10
Sumatera Utara	60	Lampung	9
Jawa Barat	49	DIYogyakarta	8
Banten	32	Nanggroe Aceh Darussalam	4
DKI Jakarta	31	Kalimantan Tengah	2
Bali	26	Kepulauan Riau	2
Sulawesi Selatan	15	Sulawesi Tenggara	2
Jambi	13	Sumatera Barat	2
Kalimantan Barat	13	Bengkulu	1
Kalimantan Timur	13	Gorontalo	1
Riau	13	Papua Barat	1
Sulawesi Tengah	12	Sulawesi Utara	1

Total : 687 Eksportir di 26 provinsi

Jumlah Pelabuhan Muat

Total : 69 Pelabuhan Muat
di 23 Provinsi



Perbandingan nilai ekspor kelompok A
Januari – Oktober dari 2 sumber (Trademap dan SILK online) (US\$)

NO	KODE HS	BPS 2012	SILK
A	Panel		
1	4408	27,939,212	26,698,035
2	4412	1,647,309,814	1,848,966,352
3	4418	260,332,165	279,511,225
	Total A	1,935,581,191	2,155,175,612
B	Woodworking		
4	4407	42,392,959	40,135,074
5	4409	431,930,283	433,247,414
6	4410	2,000,588	1,314,405
7	4411	45,724,467	47,031,061
8	4413	109,937	97,978
9	4415	11,341,975	10,162,813
10	4421	10,147,140	121,228
	Total B	543,647,349	532,109,973

Perbandingan nilai ekspor kelompok A (Lanjutan)

NO	KODE HS	BPS 2012	SILK
C	Pulp		
11	4702	-	488,464
12	4703	1,278,030,983	1,512,254,238
13	4704	3,952	17,027
	Total C	1,278,034,935	1,512,759,729
D	Kertas		
14	4803	277,884,084	316,142,925
15	4806	8,543,318	4,955,787
17	4808	3,561,967	4,224
17	4809	94,924,336	91,343,549
18	4813	33,295,702	29,304,628
19	4816	532,003	74,821
20	4818	88,835,383	61,521,981
	Total D	507,576,793	503,347,915
E	Bangunan kayu prefabrikasi		
21	9406	5,595,451	3,948,795
	Total E	5,595,451	3,948,795
Total Kelompok A		4,270,435,719	4,707,342,024

HALAMAN MUKA SILK ONLINE

 silk.dephut.go.id/index.php



SISTEM INFORMASI LEGALITAS KAYU (SILK)



Login | Signup  

Minggu, 6 Oktober 2013

Halaman Utama

Tentang Kami

Informasi

Unduh Berkas

Artikel

FAQ

Kontak Kami



» Kegiatan

2013-05-21 15:34:04 by Admin

Interzum Expo tentang SVLK - Koln, Jerman
13-16 Mei 2013

2013-02-11 09:45:47 by Admin

Interactive Market Dialogue on Indonesian
Legal Timber di Brussel

2013-02-05 16:15:20 by Admin

Interactive Marketing Dialogue on Indonesian
Legal Timber di London

[Selengkapnya]

» Berita



2013-10-04 13:48:54 by Administrator Lili

Pasar Ekspor Kayu Indonesia ke Eropa Cerah

2013-10-04 15:48:07 by Administrator Lili

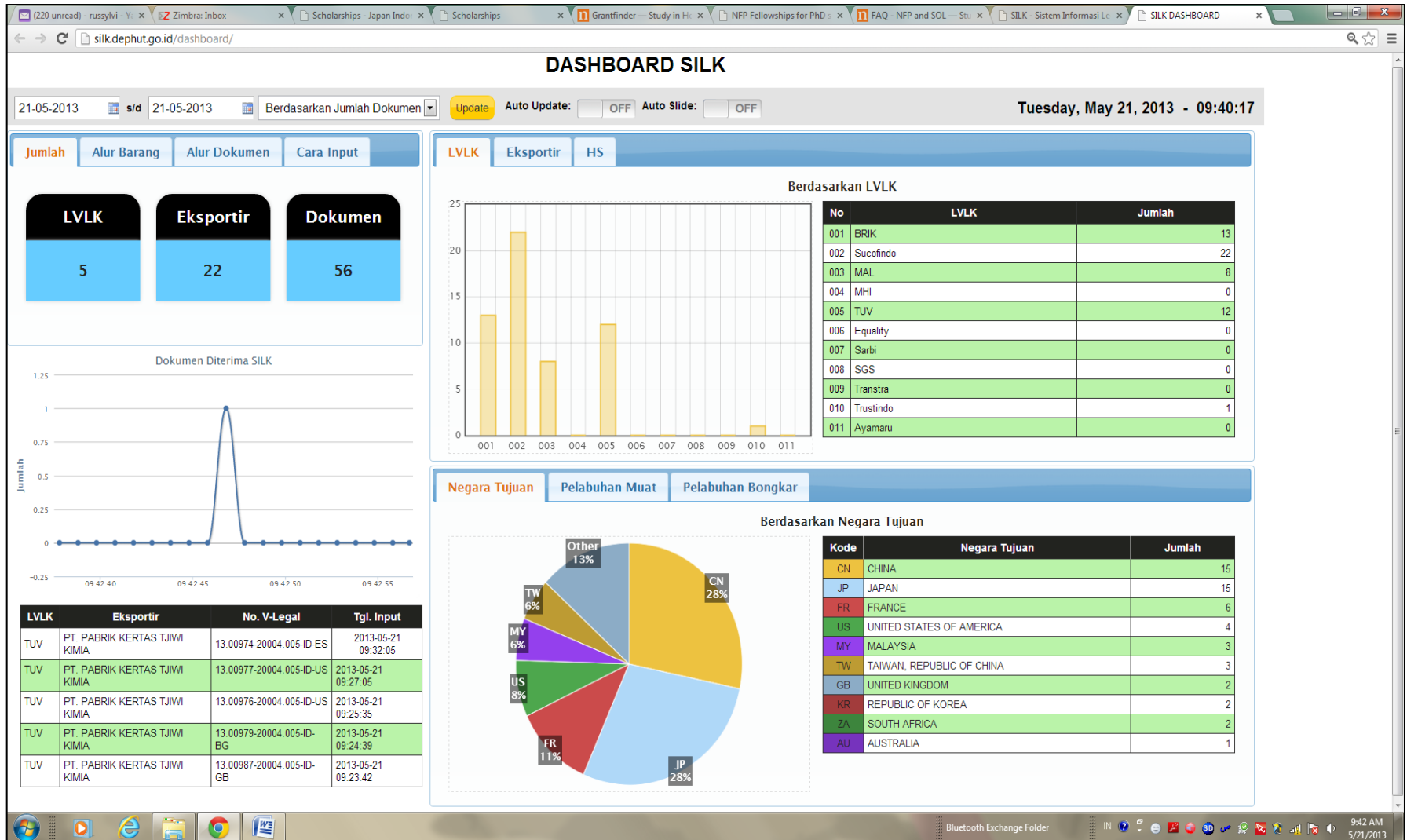
» Tabel Informasi

Rekapitulasi V-Legal

Tabel Kurs

Info	Total
Dokumen	57.887
Rekapitulasi V-Legal	1.454

DASHBOARD



SERTIFIKASI KELOMPOK

Pendampingan – Sertifikasi Kelompok

Permenhut P.38/2009 dan perubahannya

- Pasal 7 ayat (5) & (6): pendampingan dan sertifikasi untuk kelp. pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR/HKm HD, IUIPHHK $\leq$ kap 2.000 m³/tahun, TDI, IUI dengan modal investasi s.d. Rp500juta.- di luar tanah dan bangunan, termasuk IRT/ Pengrajin pada periode **pertama** dibiayai oleh Kemenhut.
- Pasal 4 ayat (5): Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak, wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh SLK

Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BPPHH/2013

- Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu

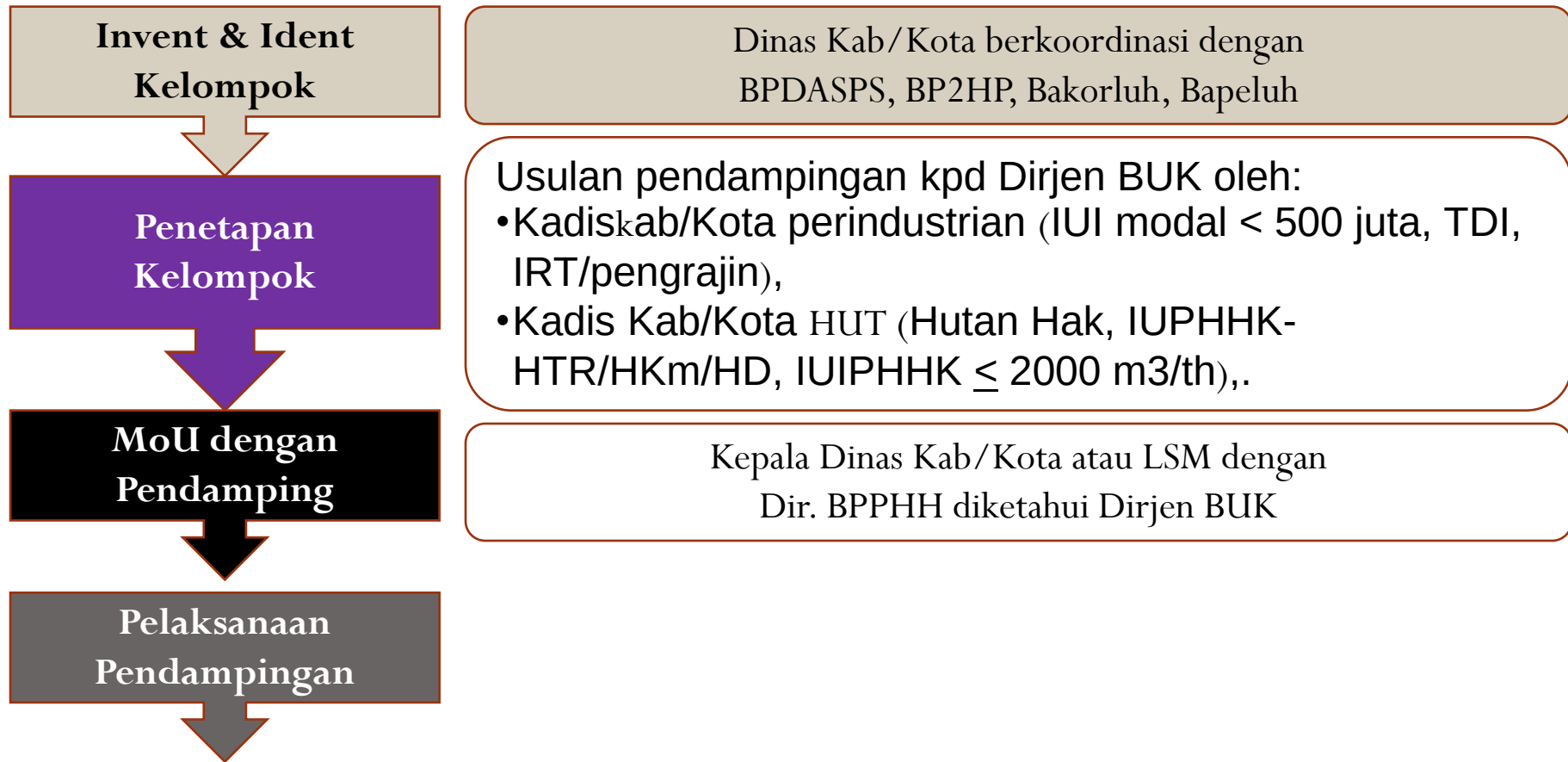
Sertifikasi Kelompok

No	Jenis Izin / u.m.	Metoda Sertifikasi
1.	Hutan Hak / Hutan Rakyat	• Mekanisme diatur dalam Perdirjen BUK No P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
2.	HTR	
3.	HKm	
4.	Hutan Desa	
5.	IUIPHHK kapasitas < 2000 m ³ /th	
6.	TDI	
7.	IUI modal < 500 juta	
8.	Industri Rumah Tangga / Pengrajin	

Syarat Usulan Pengajuan Pendampingan

- Tergabung dalam kelompok.
- Mempunyai dan melampirkan daftar susunan pengurus.
- Mempunyai dan melampirkan daftar anggota kelompok yang memuat informasi.
- Jumlah minimal anggota kelompok :
- ✓ IUIPHHK $\leq 2.000 \text{ m}^3/\text{thn}$, IUI dgn investasi Rp500jt, TDI : 10 anggota atau dalam 1 kecamatan.
- ✓ IRT/Pengrajin : 20 anggota atau dalam 1 kec
- ✓ Hutan hak : 250 ha atau dalam 1 kabupaten.
- ✓ IUPHHK-HTR/HKm/HD : 500 ha atau dalam 1 Kab

Tahapan Pendampingan S-LK Kelompok dan Aktor Pelaku (1)



Pelaksanaan Pendampingan :

Pembentukan Tim Pengarah

● SK Kepala Dinas Prov

Pembentukan Tim
Pendamping

● SK Kepala Dinas
kab/Kota

Sosialisasi SVLK
(SVLK, VLK dan PUHH dll)

Penguatan dan penyusunan
aturan kelembagaan

Sosialisasi aturan
kelembagaan

Pengumpulan Data dan
Dokumen → C&I

Dokumentasi Data

● Tim Pendamping
(jangka waktu
pelaks. 3 bulan
sejak penetapan
Tim Pendamping)

Tim Pengarah:

1. Kadis Provinsi
2. Kadis Kab/Kota
3. Bapeluh

Tim Pendamping:

1. Min. 1 orang untuk 1 kelompok.
2. Dapat berasal dari Penyuluh, PKSM, perorangan, LSM, GANIS kehutanan, pensiunan.
3. Memahami SVLK, diutamakan telah ikut pelatihan
4. Tidak terlibat kegiatan sertifikasi terkait.

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	Industri	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
1	Jabar	Sukabumi	2	0	V	V	V
		Garut	3	0	V	V	V
		Subang	1	0	V	V	V
		Kuningan	0	4	V	V	V
		Cianjur	4	0	V	V	V
		Ciamis	0	4	V	V	V
		Sumedang	0	1	-	-	-
		Tasikmalaya	5	0	V	V	V
		Bogor	1	0	V	V	V
2	Jateng	Grobogan	2	0	V	V	V
		Jepara	1	0	V	V	V
		Sukoharjo	0	1	-	-	-
		Banyumas	0	1	V	V	V
		Klaten	1	0	V	V	V

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	IKM	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
2	Jateng	Pemalang	0	1	-	-	-
		Sukoharjo	0	1	-	-	-
		Temanggung	2	0	-	-	-
		Cilacap	1	0	2014/MFP		
		Purworejo	2	0	2014/MFP		
		Pekalongan	2	0	2014/MFP		
3	DIY	Sleman	1	0	V	V	V
		Kulonprogo	1	0	V	V	V
		Bantul	1	0	V	V	V
		Gunungkidul	1	0	-	-	-
4	Kalsel	Tanah Laut	1	0	2014/MFP		
5	Bali	Singaraja	1	0	2014/MFP		

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	IKM	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
6	Jatim	Pacitan	2	0	V	V	V
		Situbondo	3	0	V	V	V
		Banyuwangi	2	0	V	V	V
		Lumajang	3	2	V	V	V
		Nganjuk	5	0	V	V	V
		Bondowoso	1	0	V	V	V
		Kediri	0	1	-	-	-
7	Sulsel	Luwu Utara	2	0	-	-	-
8	Jambi	Kerinci	2	0	V	V	V
9	Lampung	Lampung Utara	1	0	V	V	V
	Jumlah		54	16			

Progres Usulan Sertifikasi LK DIPA Dit BPPHH

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres
			HR	Industri	Usulan
1	Jabar	Ciamis	1	0	V
2	Jatim	Bondowoso	1	0	V
		Jember	1	0	V
		Jombang	1	0	V
		Kediri	1	0	V
		Lumajang	1	0	V
		Lamongan	1	0	V
		Mojokerto	1	0	V
		Pamekasan	1	0	V
		Situbondo	1	0	V
		Sumenep	1	0	V
		Tuban	1	0	V
		Jumlah	12	0	12

Total usulan sertifikasi: 12 kelompok,
Sudah dilakukan proses pelelangan secara online di lpse.dephut.go.id

Progres Pendampingan HR oleh MFP

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk HR
1	Jawa Barat	Garut	2
		Tasikmalaya	2
		Ciamis	2
		Kuningan	3
		Sukabumi	3
		Bogor	2
2	Banten	Pandeglang	2
		Lebak	1
3	Jawa Tengah	Cilacap	2
		Purworejo	2
		Wonosobo	2
		Pekalongan	2
4	Sulsel	Luwu Timur	6
5	Bali	Buleleng	1

Progres Pendampingan HR oleh MFP

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk HR
6	DIY	Gunungkidul	3
		Sleman	1
		Bantul	1
		Kulonprogo	1
7	Jawa Timur	Magetan	2
		Trenggalek	2
		Malang	2
		Jember	2
		Tulungagung	11
	Jumlah		50

**PROGRES PENDAMPINGAN IKM OLEH MITRA MFP
PERIODE APRIL – NOVEMBER 2013**

No	Mitra	Jumlah	Lokasi UMHR
1	JAVLEC	26	Jepara (10), Solo (6), Jogjakarta (4), Pasuruan (3), Jombang (1), Ngawi (1)
2	SSS	5	Sumatera Utara (2), Lampung (3)
3	SCF	2	Tomohon / Minahasa
4	Wisnu	6	Gianyar, Bali
5	SATIN	1	Buleleng
	TOTAL	40	

Progres Sertifikasi oleh MFP s.d. Agustus 2013

No.	Nama	Lokasi
1	Gapotan Jati Mustika	Blora
2	APHR Wonosobo	Wonosobo
3	Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML)	DIY
4	Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL)	Konawe Selatan
5	Koperasi Giri Mukti Wana Tirta (GMWT)	Lampung Tengah
6	Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APKAR)	Bulukumba
7	Koperasi Hutan Jati Muna (KHJM)	Muna
8	APPHRL Catur Sari	Pacitan
9	UPHR Kare Lestari	Madiun
10	APHR Panca Mulya Lestari	Malang
11	APHR Purwo Lestari	Purworejo
12	KSU APIK Buleleng	Buleleng
13	GAPOKTAN Sukamaju	Blitar
14	APPHR Tree Manunggal Lestari	Banjarnegara
15	KSU Hutan Sumber Wilis	Tulungagung
16	Koperasi Hutan Mas	Humbang Hasundutan

Perkembangan Sertifikasi Hutan Hak/ IUIPHHK

Kap < 6.000m³/thn

Dukungan Pendanaan Sertifikasi VLK	Telah / dalam proses SLK			Dalam Proses Pendampingan (September 2013)		
	Jml UM	Luasan	Jml Anggota (KK)	Jml UM	Luasan (ha/unit)	Jml Anggota (KK)
APBN 2013	12*)	10.802*)	16.295*)	50 (HR) 3 (IKM)	15.919 ha	**)
MFP 2 (SLK)	21	11,701	29,844	50 (HR) 40 (IKM)	9,042 ha	15,941
ITTO	2	1.185	3.631	-	-	-
Total	35	23.728	52.770	100 (HR) 43(IKM)	24.961 ha	-

Keterangan:

*) dalam proses pelelangan

**) Dalam proses pendataan oleh pendamping

Progress Pendampingan dan Sertifikasi oleh ITTO

❑ Pendampingan oleh ITTO di 3 lokasi :

- Kab. Ciamis,
- Kab. Temanggung,
- Kab. Ponorogo.

❑ Sertifikasi pada 2 lokasi :

- Kab. Ponorogo
- Kab. Ciamis

Industri Furniture (IKM)

- Permenhut P.42/2013 → “WAJIB” SLK 31 Desember 2013.
- Permendag 64/2012 → ekspor “WAJIB” menggunakan dokumen V-Legal.
- Klinik SVLK, kerjasama LSM dengan Dinas Perindag dan Dinas Kehutanan → Jepara, Yogyakarta, Surakarta, Pasuruan, Jombang, Denpasar.
- Dekranasda Bali mendorong implementasi SVLK bagi IKM → MoU Dekranasda dengan Dirjen BUK.

Penandatanganan MoU antara Dekranasda Bali dengan Dirjen BUK



Dukungan dana untuk SVLK

- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Pemerintah Daerah (beberapa Provinsi dan Kabupaten)
- MFP II dan MFP III
- TNC – RAFT
- Kemitraan
- WWF
- LEI
- Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak

Manfaat Sertifikasi Hutan Hak

- Hutan rakyat tidak menjadi tempat pencucian kayu ilegal (Menjaga kredibilitas SVLK)
- Kejelasan penguasaan lahan.
- Tertib pengelolaan hutan hak (TUK, dll)
- Memberian gambaran tentang potensi ekonomi yang dimiliki. Pemilik hutan hak dapat menyusun rencana ekonomi keluarga dengan lebih baik
- Hutan rakyat memiliki posisi tawar yang kuat dalam transaksi nilai jual hasil hutannya kepada industri
- Mudah mengakses fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan hutan, misalnya mendapatkan fasilitas dari BLU
- Meningkatkan pendapatan petani, karena petani bisa langsung berhubungan dengan industri (memotong rantai pedagang antara)
- Kepastian supply bahan baku bagi industri

Tantangan Sertifikasi Hutan Hak

- Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan proses sertifikasi (Pemerintah menanggung biaya sertifikasi dan pendampingannya).
- Petani hutan harus menyisihkan hasil panen untuk proses penilikan (*surveillance*), bila telah menghasilkan.

Keberterimaan Internasional terhadap SVLK

- ❖ EU → FLEGT-VPA sudah ditandatangani 30 September 2013.
- ❖ Australia → SVLK akan diakomodasi dalam *Illegal Logging Prohibition Act* melalui MoU.
- ❖ USA → SVLK memenuhi prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dengan amandemen *Lacey Act*.
- ❖ EFTA → SVLK diajukan untuk diakui dalam IE – CEPA.
- ❖ Jepang → SVLK sejalan dengan *Green Konyuho*, diupayakan bilateral.
- ❖ Korea → SVLK diajukan untuk diakui dalam IK-CEPA, diupayakan bilateral.
- ❖ China → telah ada MoU penanganan illegal logging dan saat ini peninjauan bilateral SVLK
- ❖ Greenpeace Jerman mengapresiasi SVLK.

TANTANGAN

- Menjaga kredibilitas SVLK
- Cakupan pelaku usaha yang harus SVLK (S-PHPL dan S-LK)
- Negosiasi internasional (komitmen menggunakan kayu legal)
- Koordinasi inter kementerian dan Pemda
- Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah
- Mekanisme impor
- Skema sertifikasi lain (*voluntary*)

PENUTUP

- ❑ SVLK telah menjadi komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal Logging dan illegal trading dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- ❑ SVLK mendapat apresiasi internasional (VPA telah ditandatangani) dan kinerja ekspor meningkat.
- ❑ Pemerintah memfasilitasi pendampingan dan sertifikasi secara kelompok untuk hutan hak dan industri kecil.
- ❑ Perlu dukungan kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan para pihak untuk mempromosikan produk kayu bersertifikat legal.

TERIMA KASIH

